



## Jaksa Belum Siap Tuntutan Prof. Winasa Ditunda

Denpasar (Bali Post) -

Prof. Dr. drg. I Gede Winasa yang didakwa kasus korupsi perjalanan dinas (perdin), Jumat (21/4) kemarin kembali hadir di Pengadilan Tipikor Denpasar. Pascapemeriksaan terdakwa, sidang kemarin rencananya pembacaan tuntutan dari JPU Kejari Jembrana. Namun sidang akhirnya ditunda hingga pekan depan, karena jaksa belum siap dengan tuntutannya. Majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila mengetok

palu penundaan sidang dan Winasa kembali digiring ke Lapas Jembrana.

Salah seorang tim kuasa hukum terdakwa Wayan Gede Mardika juga membenarkan agenda tuntutan ditunda karena belum siapnya jaksa. "Sidang ditunda hingga pekan depan. Tuntutan sudah dipastikan akan dibacakan pekan depan, karena hari ini (kemarin-red) belum siap," kata Mardika.

Sebelumnya, dalam agenda

pemeriksaan terdakwa Winasa tidak mau disalahkan atas kasus tersebut. Sebagai bupati, dia berkilah mempunyai staf untuk mengurus perdin termasuk ajudan. "Sudah saya jelaskan, mestinya ajudan yang diperiksa. Kan sebagai pelaksana ajudan," tandas Winasa.

Diseretnya mantan ajudan mantan bupati dua periode di Bumi Makepung itu, bukan disampaikan kali ini saja. Namun sudah beberapa kali disebut dalam persidangan,

termasuk saat memeriksa ahli dari BPK. Saat itu BPK mengaku memeriksa berdasarkan dokumen yang diberikan pihak penyidik kejaksaan. Di sanalah ditemukan beberapa kali perdin tidak sesuai fakta. Misalnya, perdin sehari bisa dilakukan tiga kali, sehingga pembayaran juga melonjak. Di samping itu, ada perdin yang dilaksanakan tidak sesuai surat tugas. BPK menemukan bukti tiket pesawat, *boarding pass* yang bahkan atas nama orang lain, sehingga ditemukan ada ketidaksesuaian.

Khusus untuk kasus di Jembrana, BPK menemukan adanya 68 SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Dari jumlah itu, ada ditemukan ketidakse-

suaian soal lamanya perdin dan bahkan tidak sesuai dengan surat tugas. Dari 68 SPPD yang dilakukan penghitungan, ada dana Rp 916 juta sekian. Padahal, dari perhitungan BPK awal ada temuan Rp 800 juta sekian, sehingga nilai ini bertambah. Dari perhitungan tersebut, BPK menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 797,5 juta.

Winasa kemudian menanggapi soal tiket dan *boarding pass* palsu. Atas keterangan itu, Winasa kemudian minta ahli menunjukkan salah satu bukti tiket yang diperiksanya. Kala itulah Prof. Winasa meminta supaya SPPD ajudan juga dihadirkan dan ditunjukkan sebagai pembanding. (kmb37)

Edisi : Sabtu, 22 April 2017

Hal : 2



# Rp 23,9 Miliar untuk Rumjab Bupati-Wabup

Rumah jabatan bupati berdiri di atas lahan seluas 1 hektare, sedangkan rumjab wakil bupati sekitar 80 are. Lokasinya di belakang kantor BPPT di Puspem Badung.



● NUSABALI/ARI SISWANTO

Di lokasi ini, di kawasan Puspem Badung di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, akan didirikan rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Badung.

MANGUPURA, NusaBali

Bupati dan Wakil Bupati Badung dalam waktu dekat dipastikan akan menempati rumah jabatan (rumjab) yang baru di kompleks Puspem Badung, di Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung sudah memasang anggaran sebesar Rp 23,9 miliar untuk biaya pembangunannya.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung IB Surya Suamba, Jumat (21/4), mengatakan, pembangunan rumjab bupati dan wakil bupati sudah masuk dalam proses tender di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tender dibuka hingga 28 April 2017, sehingga kemungkinan sebulan kemudian pembangunan fisik bisa dimulai. "Kalau tender tidak ada kendala, bulan berikutnya sudah bisa mulai pengerjaan," katanya.

Pembangunan rumjab Bupati I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa sebesar Rp 23,9 miliar lebih. Anggaran diplot di APBD induk tahun 2017. Untuk lokasinya

sudah dipastikan rumjab akan berdiri di kompleks Puspem Badung. Persisnya di belakang kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Saat ini pun telah dibuat akses jalan ke lokasi. Mengenai luasnya dirancang berbeda antara rumjab bupati dan wakil.

"Rancangannya rumjab bupati luasnya sekitar 1 hektare, sedangkan rumjab wakil bupati sekitar 80 are," tutur Surya Suamba.

Dalam pembangunan nanti, kawasan rumjab bupati dan wakil bupati akan dibikin asri dengan pepohonan rindang di sekitarnya. Makanya, pohon-pohon besar di pinggir sungai rencana tidak akan ditebang, demi merealisasikan konsep asri seperti keinginan bupati.

Secara umum gambaran rumah dinas Bupati Badung yang berkonsep Tri Mandala adalah sebagai berikut, pada utamaning mandala berupa tempat persembahyangan berupa padma dan piyasan. Kemudian madyaning mandala adalah pusat rumah di-

nas, terdapat ruang pendopo, ruang pertemuan, dan kamar tidur utama. Sedangkan pada nistaning mandala, ada garasi dan ruang tidur atau ruang istirahat untuk ajudan, sopir, dan pembantu.

"Untuk rumjab bupati ada tiga jenis ruang pertemuan. Yang besar kapasitasnya 100 orang, ada yang menengah, dan ada yang private. Sedangkan rumjab wakil hanya satu ruang pertemuan," ungkap Surya Suamba. Dia memperkirakan pada November atau paling lambat akhir Desember 2017 pengerjaan fisik sudah rampung.

Untuk diketahui, saat ini bupati dan wakil bupati masih menempati rumjab lama yang terletak di Jalan Praja, Dalung, Kuta Utara. Rumjab ini sebelumnya juga ditempati oleh Bupati Badung XI AA Gde Agung. Secara fisik rumjab lama masih layak, tetapi lokasinya kurang strategis untuk kediaman kepala daerah, karena cukup jauh dari Puspem Badung. **asa**

Edisi : 22 April 2017

Hal : 2